

LAPORAN KETERANGAN PENANGGUNG JAWABAN (LKPJ)



x x x x x x x
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA

2022



B. URUSAN KESEHATAN

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD. Alokasi anggaran sebesar Rp. 113.672.685.220,- dengan realisasi Rp. 107.149.707.750,68 Atau 94,26% dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Program Urusan Kesehatan Sesuai Dengan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
	Dinas Kesehatan				
1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka kematian ibu melahirkan (AKI)	205/100.000 kelahiran hidup	(7) 201/100.000 kh	102
		Angka Kematian Bayi (AKB)	18.6/1000 kh	(41) 11.7/1.000.000 kh	137
		Prevalensi Malnutrisi	22.15%	6,65%	>100
		Persentase Rumah Tangga PHBS	31%	32,9%	106
		Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	45%	55,40%	123
		Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	100%	100	100
		Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	100%	100%	100
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100%	100%	100
2.	Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan	Visite Rate	4.5	4.6	102
		Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	42,8	21.4	50
		Persentase UPT RSUD Terakreditasi	100	100	100
3.	Meningkatnya Kualitas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB 76.224	75,85	93,6
		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Perangkat Daerah	29.9	30,83	103
		Nilai Indeks Kepuasan	B 80,5	77.50	96.3

Lampiran Tabel 3.2 Capaian Kinerja program dan kegiatan, dituangkan sesuai dokumen anggaran :

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
a.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	53.289.800	52.859.500	99,1	Masalah Tidak Ada		
b.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	4 dokumen	4 dokumen	100%	320.000.000	303.940.093	94,9	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100%	54.819.984.000	53.647.698.829	97,8	Masalah Tidak Ada		
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100%	3.505.000	3.489.000	99,5	Masalah Tidak Ada		
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	50 jenis (100)	50 jenis (100)	100%	243.999.918	243.795.918	99,9	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
c	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100 %	9.999.400	9.999.400	100	Masalah Tidak Ada		
d	Sub Kegiatan Belanja bahan logistik kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100%	20.294.000	20.274.000	99,9	Masalah Tidak Ada		
e.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	3 Paket	3 Paket	100%	22.307.300	22.307.000	99,9	Masalah Tidak Ada		
f.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah	100	100	100%	179.988.200	177.807.839	98,7	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022									
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100 %	89.999.992	72.331.431	80,3	Masalah Tidak Ada		
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100%	15.900.000	15.880.000	99,8	Masalah Tidak Ada		
c.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100%	3.808.477.000	3.746.575.480	98,3	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
a.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100%	12.500.000	9.832.000	78,6	Masalah Tidak Ada		
b.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan.	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100 %	120.000.000	119.474.600,	99,5	Masalah Tidak Ada		
6.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD										
a.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT Puskesmas		100	100	100	10.780.795.330	9.672.458.216	90	Tidak ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota											
a.	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		100%	100%	100	830.000.000	746.155.220	89.9	Masalah Tidak ada		
b.	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		100%	100%	100	195.000.000	194.010.733,29	98.5	Masalah Tidak ada		
c.	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	100%	100	995.994.040	895.801.050	89.9	Masalah Tidak ada		
d.	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100%	100%	100	5.371.446.000	5.009.384.467	93.3	Masalah Tidak ada		
e.	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022	85%	> 85%	100	1.058.152.633	928.631.255	87,6	Ada item yang tidak dapat disuplai atau pengurangan volume karena penyedia tidak dapat memenuhi akibat kendala bahan baku, bahan kemasan dan proses produksi.	1. Melakukan kontak dengan distributor secara intens agar didapatkan informasi ketersediaan produk e-katalog secara akurat sebelum masa kontrak habis. 2. Melakukan addendum setelah mendapatkan informasi kepastian produk tidak dapat disuplai.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
f.	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Peraturan Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022	75%	75%	100	2.353.802.597	1.598.826.244	67,9	1. Hanya ada 1 item produk e katalog yang tidak dapat disuplai oleh penyedia, yaitu Alkohol Swab karena terjadi kekosongan stok sampai kontrak berakhir, senilai Rp. 23.550.000,- 2. Ada perbedaan pagu DPA dan RK untuk penyediaan BHP Gula Darah, pada DPA sebesar Rp. 1.089.637.000,- sedangkan pada RK sebesar Rp. 800.800.000,- 3. Pada realisasi penyediaan BHP Gula Darah harga satuan didapatkan pada e katalog dengan harga yang jauh lebih kecil sehingga dengan volume yang sesuai RK terdapat kelebihan anggaran	addendum setelah mendapatkan informasi kepastian produk tidak dapat disuplai.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehaan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Rujukan Tingkat Kab/Kota											
a.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	SK BUPATI No: 188.45/231/KPTS-BUP/2022 Tentang Pembentukan Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Dharmasraya	100%	100	100	40.000.000.	34.843.500	87,1	1. Masih ada kasus Kematian Ibu sebanyak 7 orang 2. Belum tercapainya ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar 3. Kompetensi Petugas Kesehatan masih kurang	1. Mengadakan Pertemuan Evaluasi Hasil Superfisi Fasilitas Bidan Koordinator (BIKOR) di Puskesmas 2. Bimtek dan monitoring evaluasi secara terpatu lintas program ke UPT Puskesmas 3. Pelatihan/workshop tentang kompetensi kebidanan	
b.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100%	95,46	95,46	263.077.000	53.511.000	20,3	1. Belum semua Fasyankes mampu memiliki kelengkapan SDM, ruangan, alat kesehatan untuk siap menerima persalinan 2. Masih ada persalinan dengan tenaga non kesehatan	1. Melengkapi sarana prasara difasyankes sesuai standar 2. Meningkatkan edukasi pada keluarga tentang bahaya melahirkan dengan tenaga non kesehatan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
c.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	SK BUPATI No: 188.45/231/KPTS-BUP/2022 Tentang Pembentukan Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Dharmasraya	100	97	97	25.000.000	22.957.500	91,8	1. Masih tinggi angka kematian Bayi sebanyak 43 orang, dan anak balita sebanyak 5 orang 2. Manajemen Pelayanan sistem rujukan yang harus diperbaiki	1. Mengadakan Pelatihan berhubungan dengan peningkatan kompetensi petugas kesehatan dalam pemberian pelayanan pada Kunjungan Neonatus (KN 4) berkualitas, termasuk menangani kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal. Mengadakan Pertemuan Evaluasi Hasil Superfisi Fasilitatif Bidan Koordinator (BIKOR) Puskesmas Se- Kabupaten Dharmasraya 2. Perlunya Pendampingan Tim Ahli Ke Puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan system rujukan maternal dan neonatal.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
d.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peraturan Bupati No.14 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif	100%	95,7%	95,7	35.000.000	28.949.800	82,7	1. Masih ada balita gizi buruk yang pertumbuhannya tidak terpantau setiap bulan 2. Capaian ASI Eksklusif masih rendah	1. Pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala 2. Koordinasi lintas program lintas sektor dan OPD terkait dalam rangka penanggulangan stunting 3. Edukasi menyusui, memberikan MPASI, Pemberian makanan bayi dan anak yang baik	
e.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		100%	95.5%	95,5	29.000.000	28.332.800	97,7	1. Tingginya mutasi pengelola UKS di Puskesmas sehingga menyebabkan kesulitan dalam melanjutkan program UKS tersebut	1. Pengelola program UKS minimal boleh diganti setelah tiga tahun berjalan 2. Puskesmas terutama pengelola program UKS harus membuat Rencana kegiatan setiap bulannya untuk kegiatan program UKS dan juga saling berkoordinasi dengan program lainnya agar tidak terjadi saling dempet dalam pelaksanaan kegiatan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
f.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		100%	92,6%	92,6	25.000.000	21.838.750	87,4	1. Kurangnya tenaga Kesehatan di puskesmas yang terlatih CTU 2. Kesulitan tenaga kesehatan puskesmas untuk mendapatkan skrining pada usia produktif yang diluar kota	1. Mengupayakan pelatihan CTU bagi tenaga kesehatan puskesmas 2. Menetapkan penatalaksanaan bagi usia produktif yang berada diluar kota	
g.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		100%	100%	100	30.000.000	25.534.412	85,1	1. Penyakit terbanyak pada Lansia adalah Penyakit Tidak Menular (PTM) 2. Kesulitan membawa alat ukur lansia guna sining lansia resti dengan ketergantungan berat	1. Mengupayakan skrining lansia 60 th terpantau kesehatannya secara menyeluruh di fasilitas kesehatan 2. Mengupayakan kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk pengadaan alat ukur lansia	
h.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM	100%	100	100	37.160.000	34.754.000	93,5	1. Pelayanan kesehatan sesuai standar pada penderita hipertensi belum mencapai target (63,19%)	1. Menambah PAGU dana untuk Program PTM melalui kegiatan Skrining dan pelayanan kesehatan 2. Membuat MOU/Perjanjian	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2019 Tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM (Standar Pelayanan Minimal)							2. Belum semua pemeriksaan orang dengan hipertensi dilaporkan karena pasien yang diperiksa di DPM (Dokter Praktek Mandiri), BPM (Bidan Praktek Mandiri) dan Klinik belum dilaporkan ke Fasyankes. 3. Masih adanya Tenaga Pengelola IVA (Bidan dan Dokter) di Puskesmas yang belum dilatih	2. Kerjasama dengan BPM, DPM dan klinik swasta dalam pelaporan dan pelayanan penderita hipertensi 3. Mengadakan pelatihan bagi pengelola program PTM dipuskesmas dan mengusulkan supaya ada yang membantu pengelola PTM 4. Mengadakan pelatihan bagi Bidan dan dokter yang belum dilatih IVA	
i.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1. Permenkes no.4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada	100%	100	100	48.180.000	46.609.750	96,7	1. Pencatatan dan pelaporan yang masih belum tepat waktu 2. Peng entry-an data ke dalam aplikasi asik	1. Melakukan kroscek data capaian pada pengelola program secara berkala. 2. Mengadakan pelatihan kepada pengelola dan kader	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		standar pelayanan minimal bidang kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan PTM							yang belum sesuai dengan capaian manual	dalam pengisian aplikasi asik sesuai dengan data dan waktu pelaporan	
j.	Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1. UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa 2. PMK No. 54 Tahun 2017 Tantang Pemasungan pada orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/370/KTPS-BUP/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa	100%	100	100	50.000.000	49.631.000	99,3	1. Masih adanya tenaga pengelola program yang belum dilatih karena adanya mutasi pegawai di puskesmas 2. Masih adanya pasien ODGJ berat yang putus pengobatan dan pasien pasung	1. Mengadakan pelatihan bagi pengelola program keswa di puskesmas terutama untuk Dokter, Perawat dalam melaksanakan Deteksi dini 2. Edukasi kepada keluarga agar secara rutin memberikan obat kepada pasien dan juga tentang bahwa tidak boleh lagi di lakukan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Masyarakat KAbupaten Dharmasraya									
k.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1. SE Nomor: HK.02.02/III.1/93 6/2021 tentang Perubahan Alur Diagnosis dan Pengobatan Tuberkulosis di Indonesia 2. PERPRES no. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC	100%	89,6	89,6%	65.000.000	64.766.250	99,6	1. Penemuan Terduga TBC masih belum mencapai target Penemuan Kasus TBC belum mencapai target 2. Adanya tugas rangkap dari pengelola TBC puskesmas sehingga sulitnya membagi waktu untuk pelaksanaan program TBC 3. Masih adanya tenaga pengelola TBC di puskesmas yang belum di latih 4. Pengambilan sputum dari terduga TBC susah didapat 5. DPM dan klinik swasta belum	1. Menambah PAGU dana untuk Program TBC agar penemuan terduga TBC lebih banyak melalui kegiatan Investigasi Kontak dan penjangkaran. 2. Mengadakan pelatihan bagi pengelola program TBC di puskesmas terutama untuk Dokter, Perawat, dan Labor. 3. Edukasi masyarakat tentang bahaya penyakit TBC dan segera memeriksa kesehatan apabila ada gejala TBC. 4. Meningkatkan Kerjasama dengan jejaring layanan TBC	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									optimal dalam pengiriman laporan 6. Adanya perubahan definisi operasional (DO) indikator terduga TBC yang sebelumnya (DO) terduga yang diperiksa adalah kasus TBC paru BTA Positif sedangkan pada tahun 2022 DO indikator terduga TBC berdasarkan jumlah TBC semua tipe.		
1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1. Kepmenkes RI No. HK. 01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan	100%	100	100%	45.000.000	44.202.750	98,2	1. Tidak adanya penjangkau di lapangan untuk membantu dalam menjaring orang terduga terinfeksi HIV/AIDS.	1. Menambah PAGU dana untuk Program HIV/ AIDS agar pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS lebih banyak melalui	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Kedokteran Tata Laksana HIV 2. Permenkes Ri Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV/AIDS							2. Belum semua pemeriksaan orang dengan risiko terinfeksi HIV/AIDS dilaporkan secara online ke dalam system pelaporan SIHA, karena pasien yang diperiksa di PMB, DPM, dan Klinik belum di laporkan ke fasyankes.	kegiatan screening pada kelompok berisiko. 2. Mengalokasi kan dana untuk honor penjangkau di lapangan. 3. Membuat MOU/ kerjasama dengan Praktik Mandiri Bidan (PMB), Klinik swasta dan Rumah sakit untuk pelaporan dan pemeriksaan	
m.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100 %	100	100	643.282.700	537.832.317	83,6	Masalah Tidak Ada		
n.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peraturan Presiden No 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting Keputusan Bupati Dharmasraya No. 188.49/65/KPTS-	100%	96%	96%	297.545.900	216.934.950	72,9	1. Masih adanya kasus Stunting di Kabupaten Dharnmasraya 2. Masih belum teraudit kasus stunting secara merata dan	Melaksanakan audit kasus stunting merevitalisasi nagari sadar gizi menggalakkan aksi bergizi disekolah dengan pemberian tablet tambah darah	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		BUP/2021 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dharmasraya							masih adanya sanitasi yang buruk 3. Keterbatasan akses air bersih 4. Nagarai sadar gizi belum terrevitalisasi seluruhnya	kepada remaja putri dan konsumsi gizi seimbang pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan lokal kepada balita dan ibu hamil KEK Merevitalisasi nagari sadar gizi Menggalakkan aksi bergizi disekolah dengan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dan konsumsi gizi seimbang Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan lokal kepada balita dan ibu hamil KEK	
0.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		40%	40%	100%	47.858.000	47.327.650	98.9	1. Belum terlaksananya pengukuran kesehatan bagi masyarakat, pelajar dan ASN secara keseluruhan	Membentuk tim dan rencana kegiatan pada pengukuran kebugaran pada masyarakat, ASN dan pelajar. Membuat perencanaan dan dukungan anggaran	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									2. Perlunya edukasi dan motivasi bagi petugas dalam pengukuran kebugaran.	untuk edukasi petugas	
p.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		75%	75%	100%	187.634.900,-	187.026.400	99.68	1. Masih rendahnya pemilik fasyankes dalam membuat MOU pengelolaan limbah medis. 2. Tempat penyimpanan sampah B3 dan sampah medis yang belum memenuhi standar secara permenlhk no 5 tahun 2021 3. Masyarakat belum merasakan pentingnya tempat BAB yang baik menurut kesehata	Selalu memberikan motivasi dan edukasi bagi petugas puskesmas dan pemilik fasyankes untuk melakukan kerjasama MOU Limbah medis Perlunya fasilitas fasyankes menyediakan sarana dan prasarana tempat penyimpanan sementara limbah medis dan limbah B3 Selalu Mengedukasi masyarakat melalui pemecuan untuk BAB pada tempat yang memenuhi syarat kesehatan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
q.	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	PMK no 45 tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan	100%	100	100%	40.120.000	39.897.000	99,4	Meskipun sudah semua Puskesmas melakukan Surveilans Aktif namun masih perlu adanya peningkatan komitmen Rumah Sakit dalam melaksanakan Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS)	Peningkatan komitmen dan konsistensi Rumah Sakit untuk melakukan Surveilans Aktif Rumah Sakit (SARS)	
r.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	UU No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa PMK No. 54 Tahun 2017 Tentang Pemasangan pada orang dengan Gangguan Jiwa Berat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/370/KTPS-BUP/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Dharmasraya	75%	75	100	. 54.660.000	. 52.694.000	96,4	Masih adanya tenaga pengelola program yang belum dilatih karena adanya mutasi pegawai di puskesmas Masih adanya pasien ODGJ berat yang putus pengobatan dan pasien pasung	Masih kurangnya alat pemeriksaan napza kit di masiing-masing puskesmas. Masih kurangnya pelaksanaan skrining ASSIST dengan memakai aplikasi sinapza.. Skrining SRQ dan SDQ masih rendah.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
s.	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		100%	100	100	167.705.200	167.156.900	99.7	1. Belum terpenuhi 12 indikator PIS-PK dalam Masyarakat 2. Indeks Keluarga Sehat Masih Rendah (< 0.500) 3. Kurangnya perilaku PHBS di lingkungan Masyarakat 4. Kekurangn tenaga dalam pelaksanaan piket posko sehubungan dengan kegiatan puskesmas di masa pandemi covid-19 5. Kekurangan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan pada event- event tertentu spt ambulan	1. integrasi dan koordinasi lintas program lebih ditingkatkan 2. pelaksanaan intervensi lanjut dan update data PIS-PK pada aplikasi 3. meningkatkan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat 4. Dengan melibatkan beberapa puskesmas dalam menindaklanjuti kekurangan tenaga, sarana dan prasarana	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
t.	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1. Permenkes Nomor 50 tahun 2017 tentang standar baku mutu Kesehatan lingkungan dan persyaratan Kesehatan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit serta pengendaliannya 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	85	85	100	35.000.000	33.437.000	95,5	1. Masih banyak puskesmas yang belum memiliki tenaga terlatih dan pertukaran pengelola sehingga berdampak terhadap pencapaian Program 2. Beban kerja atau rangkap program dari petugas sehingga kurang fokus dalam pelaksanaan Program 3. Masih banyak puskesmas yang belum melibatkan lintas sektor dalam pengendalian dan pencegahan penyakit berbasis binatang	1. Sebaiknya petugas yang telatih tidak di mutasi sehingga pelaksanaan program tercapai sesuai dengan target 2. Sebaiknya program terutama yang masuk dalam indikator SPM tidak di berikan rangkap Program sehingga petugas bisa lebih fokus dalam pelaksanaan Program 3. Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan Kerjasama dengan lintas sektor sehingga pencegahan penyakit berbasis binatang bisa teratasi	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		4. PERMENKES Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta									
u.	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan	100%	100	100%	9.500.000.000	9.242.848.000	97,3	1. Belum tercapainya UHC Kabupaten Dharmasraya 100%. 2. Masih ada penduduk miskin yang belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran PBPU/BP Pemda dan masih Terdapat pekerja swasta/masyarakat mampu yang terdaftar menjadi peserta PBPU/BP pemda	1. Melakukan rekonsiliasi 1 kali 3 bulan antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan Cabang Solok 2. dilakukan kembali verifikasi data melalui aplikasi SIGNG Dinas Sosial.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pelaporan kepesertaan PBPU/BP pemda yang sudah meninggal maupun pindah untuk menonaktifkan kartu kepesertaannya		
v.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100	100	100	691.048.000	650.700.776	94,1	Masalah Tidak Ada		
w.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang	42.8%	21,4	21,4	184.880.000	0	0	1. Survey Akreditasi/ Reakreditasi	1. Survey Akreditasi tidak bisa dilaksanakan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Akreditasi Puskesmas							Puskesmas Tidak Terlaksana 2. Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah 3. Kurangnya pemahaman dan keseriusan puskesmas dalam menerapkan nilai-nilai akreditasi	sehubungan dengan surat edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 Penundaan Pelaksanaan Survey akreditasi sebagai dampak pandemi covid-19 2. Pendampingan Puskesmas oleh tenaga pendamping terlatih 3. Meningkatkan pembinaan oleh dinas kesehatan	
x.	Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1. PMK No 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi	100%	100	100	104.480.000	104.480.000	100	1. Masih adanya kelompok masyarakat yang menolak Program Imunisasi 2. Adanya selisih jumlah sasaran antara pusdatin dengan data sasaran riil	1. Penguatan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam mendukung Program Imunisasi 2. Perlunya perbandingan cakupan berdasarkan data Pusdatin dengan real	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
y.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1. PMK no 1501 th 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan 2. Perpres No 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulanagn Pandemi Covid-19 3. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022	100%	100	100%	. 156.676.400	156.305.583	99,8	Kasus Covid-19 tahun 2022 masih ada yaitu sebanyak 296 kasus dengan jumlah yang meninggal 12 kasus	Meskipun terjadi penurunan kasus Covid-19 namun masih sangat perlu mempertahankan protocol kesehatan dan peran surveilan aktif Puskesmas dan Rumah Sakit dalam upaya mencegah dan deteksi dini penyebaran kasus Covid-19	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
z.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan UPT Puskesmas	Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 19 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri kesehatan nomor 2 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan tahun anggaran 2022	100%	87	87	9.371.407.000	8.422.736.669	90	1. Pelaksanaan di POA kurang terealisasi 2. Kurang mambu dalam pemanfaatan anggaran di puskesmas 3. Perencanaan tidak menjawab masalah yang ada di puskesmas	1. menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan 2. Perbaiki/verifikasi perencanaan POA kegiatan program setiap triwulan	
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi										
a.	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	60	60	100%	104.996.700	104.318.605	99,3	Masalah Tidak Ada		
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN										
1.	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM DI Wilayah Kab/Kota										
a.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan TenagaKesehatan serta TindakLanjut Perizinan PraktikTenaga Kesehatan	PMK No 14 Tahun 2021. Tentang Standar Kegiatan	100	100	100	54.693.200	54.246.300	99.2	Belum semua sarana kesehatan dan tenaga kesehatan yang menyelenggarakan	Melakukan sosialisasi dan advokasi bersama lintas sektor terkait kepada pemilik sarana kesehatan yang bertujuan	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan							pelayanan namun belum mempunyai izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP).	untuk memberikan pemahaman pentingnya pengurusan izin usaha/praktik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	
b.	Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Aplikasi Si-SDMK dan Aplikasi Rencana Kebutuhan Kementerian Kesehatan RI.	100%	100	100%	34.089.200,-	33.615.541	98,6	Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terutama untuk 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di fasyankes.	Melakukan pemetaan atau pemutakhiran data anjab/abk fasyankes agar terpenuhinya 9 jenis tenaga di fasyankes dan distribusi tenaga kesehatan yang sesuai dengan standar.	
c.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peraturan Bupati Dharmasraya No 21 tahun 2021 tentang Standar biaya umum pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun anggaran 2022	100 %	100	100 %	41.710.000	41.310.822	99,0	Masalah Tidak Ada		

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
D.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN										
1.	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
a.	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022	85%	85%	100%	28.477.000	28.105.600	98,7	Masalah Tidak ada	Tidak ada	
2.	Kegiatan Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri rumah tangga dan Nomor PIRT sebagai izin Produksi, untuk Produk makanan minuman tertentu yang dapat di Produksi Oleh Industri Rumah tangga										
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2021 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022	100%	100	100%	391.657.000	389.560.650	99,5	Masih banyaknya Industri Skala Kecil hingga sakala menengah yang belum Terdaftar sebagai IRTP dan mengurus Iizin sehingga banyak yang belum mendapatkan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka penerbitan SPP-IRT sebagai salah satu syarat untuk terdaftar sebagai IRTP yang memiliki Izin sesuai	Perlu Koordinasi Lintas sektor dan Komitmen bersama (Koperindag, DPMTSP, LOKA POM, dan Bagian Perekonomian) untuk dapat mendorong Industri Skala Kecil hingga Menengah mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan efektifitas Pengawasan Produksi dan Peredaran pangan Industri yang ada serta dapat mewujudkan Produk IRTP yang mampu bersaing di pasaran	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									dengan perundangan yang berlaku		
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN										
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SEKTOR Tingkat Daerah Kab/Kota										
a.1	Sub Kegiatan Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat		75	75	100	50.765.500	50.051.300	98,6	Belum semua kader yang terakomodir untuk mendapatkan pelatihan, disebabkan karena jumlah kader yang banyak, yaitu sekitar 1.280 orang kader sementara jumlah yang mengikuti pelatihan sekitar 150 orang atau sekitar 11% pada tahun 2022	Memfasilitasi peningkatan kapasitas kader melalui dana DAK Non Fisik Kabupaten, dana DAK non fisik Puskesmas dan dana Nagari. Mengoptimalkan promosi kesehatan melalui edukasi Memperbanyak media promosi dan buku bacaan kader	
b.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat	SK Bupati No.189 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Germas di Kabupaten Dharmasraya	75%	75	100	40.995.100	39.712.000,00	96,9	Semua kecamatan sudah melaksanakan kegiatan germas, namun implementasi germas aktif belum terlaksana sebagaimana mestinya, ini disebabkan oleh belum semua indikator germas aktif diimplementasikan	Mengedukasi masyarakat agar berperilaku Hidup Sehat dengan menerapkan Indikator Germas Penguatan Forum Germas agar dapat melaksanakan Tupoksi masing-masing secara optimal sesuai dengan yang tertuang dalam	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
									oleh masyarakat seperti masih ada masyarakat yang belum cek kesehatan secara rutin setiap bulannya, makan buah dan sayur setiap harinya, masih ada yang merokok menurut laporan PIS-PK tahun 2021 sekitar 61,49%	regulasi	
c.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		100%	100	100%	41.239.400,0	40.815.300,	99	Belum semua Nagari Siaga, Posyandu, Saka Bakti Husada, Poskesri, Poskestren yang aktif	Mengaktifkan pokjanal dan pokja dengan dukungan lintas sektor Perlu dianggarkan dana untuk Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) secara berkelanjutan terutama didukung oleh dana nagari	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	UPT RSUD SUNGAI RUMBAI										
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD										
a.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT RSUD Sungai Rumbai		100	100	100%	6.600.000.000	6.009.924.292	91,1	- Rumah Sakit belum terdapat pagar keliling, sehingga akses masuk belum satu pintu dan resiko tindakan kriminal. - Pengetahuan masyarakat masih kurang tentang jenis pelayanan di rumah sakit. - SDM yang terbatas mengakibatkan sebagian tenaga harus multi work.	- Membuat rencana kegiatan anggaran kepada pimpinan untuk pembangunan pagar rumah sakit. - Melakukan Sosialisasi dan desiminasi secara langsung kepada seluruh pengunjung rumah sakit dan melalui media sosial tentang pelayanan rumah sakit. - Membuat rencana kebutuhan SDM dan mengajukan pengadaan SDM kepada pimpinan.	

No	Program Kegiatan	Kebijakan	Target dalam dokumen anggaran	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Alokasi Anggaran	Realisasi (Rp)	%	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
I Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota											
a.	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RSUD Sungai Rumbai		100	100	100%	2.803.911.800	2.326.475.597	83	- Sebagian masyarakat belum mendapatkan akses informasi dan layanan rumah sakit - Belum operasionalnya kamar operasi karena belum tersedianya dokter spesialis dasar dan penunjang	- Secara berkesinambungan memberikan informasi kepada masyarakat tentang jadwal dan jenis layanan di rumah sakit - Menambah SDM dokter spesialis dasar dan penunjang melalui referral - Menyediakan obat dan perbekalan yang menjadi prioritas layanan rumah sakit	

Pulau Punjung, Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Drs. Yefrinaldi, MM
NIP. 19670608 199403 1 008

1. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJNJIAN KINERJA

1. Sasaran Meningkatnya status kesehatan masyarakat telah dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengadaan Obat,Vaksin

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan obat esensial untuk pelayanan kesehatan primer

b. Sub Kegiatan pengadaan bahan habis pakai

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan BMHP untuk pelayanan kesehatan primer BHP untuk program gula darah dan cartridge TCM

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Output sub kegiatan ini adalah Pertemuan Pemantapan Pengisian E-Kohort, Pengkajian dan Pembelajaran AMP, Pertemuan Penguatan Inovasi Bidadari Keluarga sehingga pemantauan kesehatan ibu hamil dapat terpenuhi sesuai standar.

b. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Output sub kegiatan ini adalah memberikan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin sesuai standar di fasilitas kesehatan.

c. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Output sub kegiatan ini adalah Pertemuan Peningkatan Kapasitas “MTBM /MTBS” yang bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Petugas Kesehatan (Pengelola Program Anak dan bidan di desa) dan Pertemuan Simatneo.

d. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Balita

Output sub kegiatan ini adalah berupa Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita (MTBM/MTBS) bagi Petugas Kesehatan (Bidan dan TPG Puskesmas), Skrining Balita melalui SDIDTK, Pertemuan Monev Program, Pertemuan Papa Sadar Gizi, Pengadaan Kohort Anak

e. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Output sub kegiatan ini adalah Bimtek pada Petugas UKS Puskesmas dan dan Guru UKS (114 orang), Pembinaan Program UKS ke Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar pada Usia Pendidikan Dasar sebanyak 33.303 siswa

f. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Output sub kegiatan ini adalah Pertemuan Geriatrik Lansia, Pertemuan Monev Lansia, Konsultasi Program Lansia, Bimtek Program Lansia ke Puskesmas, Pelayanan terhadap 158484 yang di skrining, tersedianya 14 lembar balik dan 13 buku pedoman konsultasi

c. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia lanjut

Output sub kegiatan ini adalah pembinaan pelayanan pemeliharaan kesehatan kepada 18181 lansia dengan tersedianya 28 lansia kit, 1400 buku kesehatan lansia dan 28 Instrumen Geriatrik Depressions.

d. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 29.124 orang yang mengalami hipertensi kegiatan dilaksanakan yaitu pemeriksaan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, dan aktifitas fisik.

e. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 2.738 orang yang menderita diabetes melitus, kegiatan dilaksanakan edukasi,aktifitas fisik,terapi nutrisi medis dan intevensi farmakologis.

- f. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**
Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 444 orang yang menderita gangguan jiwa berat, kegiatan dilaksanakan edukasi dan evaluasi tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasangan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas sederhana.
- g. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tuberkulosis**
Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 2.879 orang terduga tuberkulosis kegiatan dilakukan Pertemuan Jejaring Program TBC dengan KOPI TBC dan DPPM, Evaluasi Kegiatan Investigasi Kontak, Evaluasi Pengisian Aplikasi Online TBC (SITB), Penguatan Inovasi Program TBC dengan NAGARI OKE TBC, Monitoring dan Evaluasi Program TBC
- h. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV**
Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 5.316 orang dengan resiko terinfeksi HIV, Penggalangan Komitmen Bersama untuk Pemeriksaan Triple Eliminasi di BPM, Kegiatan Refreshing Program HIV, Pendampingan dan Penatalaksanaan TBC-HIV
Monitoring dan Evaluasi Program HIV
- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)**
Output sub kegiatan ini adalah terkelolanya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) di Kabupaten Dharmasraya
- j. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**
Output sub kegiatan ini adalah Pengelolaan pelayanan kesehatan Gizi masyarakat
- k. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga**
Output sub kegiatan ini adalah Terwujudnya seluruh ASN dan pelajar melakukan pengukuran kebugaran baik dari sektor formal maupun non Formal
- l. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan**
Output sub kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan mewujudkan Kabupaten Dharmasraya ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang air Besar sembarangan dan akses terhadap jamban yang sehat.
- m. Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan**
Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 16 Fasyankes (14 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit) . Kegiatan yang di laksanakan yaitu : Pendampingan Surveilans Aktif Puskesmas dan Rumah Sakit, Penyelidikan Epidemiologi Kasus AFP sebanyak 3 kasus dari target 2 kasus di Faskes Tingkat satu, Penyelidikan Epidemiologi Kasus Campak/Rubella sebanyak 14 kasus dari target 10 kasus di Faskes Tingkat satu, nPeningkatan Kapasitas bagi petugas Surveilans dalam Pelaksanaan SKDR Mingguan , monitoring dan evaluasi Program Surveilans, Bimbingan Teknis Pelaksana Program Surveilans, Pelaksanaan Buletin Mingguan SKDR
- n. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA**
Output sub kegiatan ini adalah pelayanan kasus jiwa yang tertangtangani terhadap 444 orang penderita gangguan jiwa, Tindakan skrining memakai formulir kesehatan jiwa. Dan skrining assitst untuk menjaring penyalahgunaan napza
- o. Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular**
Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan pada 4 jenis penyakit yaitu : DBD, Malaria, GHPR, dan Kusta. Pelayanan terhadap 47 orang kasus DBD, 241 orang kasus GHPR, 0 orang kasus Malaria (telah eliminasi) dan 2 orang kasus Kusta
- x. Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya**
Output sub kegiatan ini adalah meningkatnya persentase pelayanan operasional instalasi gudang farmasi kabupaten (IGFK) dan labor kesehatan daerah (Labkesda) Kabupaten Dharmasraya

- y. **Sub Kegiatan investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)**

Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 3.516 sasaran yang mendapatkan Imunisasi Rutin. Kegiatan yang dilaksanakan Peningkatan Kapasitas bagi petugas Imunisasi, monitoring dan evaluasi Program Imunisasi, imbingan Teknis Pelaksana Program Imunisasi, Pendampingan pelaksanaan pemberian Imunisasi pada Bayi, Baduta, Balita, Anak Sekolah dan WUS

- z. **Sub Kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah**

Output sub kegiatan ini adalah pelayanan terhadap 296 kasus. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu

- 1) Pendampingan Surveilans Aktif Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Deteksi Dini Kasus Covid-19
- 2) Penyelidikan Epidemiologi Kasus Covid-19 sebanyak 296 kasus dari tahun sebelumnya 2.197 kasus di Faskes Tingkat 1
- 3) Peningkatan Kapasitas bagi petugas Surveilans dan Imunisasi dalam pencegahan Kasus Covid-19
- 4) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Covid-19
- 5) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penanganan Kasus Covid-19 bagi petugas Puskesmas dan Rumah Sakit
- 6) Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanggulangan Covid-19

- aa. **Sub Kegiatan Operasional Pelayanan UPT Puskesmas**

Output Sub Kegiatan: terlaksananya operasional pelayanan kesehatan yang menjadi program prioritas di 14 UPT Puskesmas

- bb. **Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RSUD Sungai Rumbai**

Output Sub Kegiatan ini adalah pemenuhan operasional pelayanan RSUD Sungai Rumbai dengan meningkatnya akses, mutu layanan dan pemenuhan standar rumah sakit seperti penambahan dokter spesialis referral dan jenis layanan serta pengembangan sarana prasarana.

Selain itu sesuai dengan perjanjian kinerja RSUD Sungai Rumbai telah meningkatkan sarana dan prasarana serta alat kesehatan sebagai penunjang layanan. Capaian indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sarana RSUD Sungai Rumbai (95,34%)
2. Persentase Prasarana Pendukung RSUD Sungai Rumbai (60%)
3. Persentase ketersediaan Alat Kesehatan RSUD Sungai Rumbai sesuai standar (31,76%)

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. **Kegiatan Advokasi Pemberdayaan ,Kemitraan ,Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. **Sub.Kegiatan Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat**

Output sub kegiatan ini adalah tersedianya media promosi dan sosialisasi informasi kesehatan

2. **Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota**

- a. **Sub. Kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat**

Output sub kegiatan ini adalah Gerakan masyarakat hidup sehat pada semua Kecamatan

3. **Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) Tingkat Kabupaten/Kota**

- a. **Sub kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat(UKBM)**

Output sub kegiatan ini adalah persentase Nagari yang melaksanakan UKBM Aktif

C. PROGRAM KESEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga

- a. Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi , untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Output sub kegiatan ini adalah Pertemuan Penyuluhan Keamanan Pangan 1 Kali untuk pelaku usaha IRTP sebanyak 80 Orang, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) 5 Kali untuk Kader Posyandu, Dasawisma, Guru UKS, Kader SBH, Tokoh Masyarakat sebanyak 250 Orang, Pertemuan Kader Keamanan Pangan untuk kader gizi yang menjadi Lokus Stunting sebanyak 30 Orang, serta pengadaan leaflet, modul dan lain-lain.

II. Sasaran Meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan telah dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1. Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya

Output sub kegiatan ini adalah satu unit gedung puskesmas Pembantu (PUSTU) Sesuai standar

- b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Output sub kegiatan ini adalah stu unit gedung poskesri, pagar poskesri dan pembangunan/penimbunan jalan /akses ke puskesmas beringin sakti

- c. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Output sub kegiatan ini adalah terpenuhinya pendukung pelayanan rujukan di puskesmas, dan terbangunnya satu unit prasarana air bersih Labkesda

- d. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Output sub kegiatan ini adalah terpenuhinya alat kesehatan di Labkesda dan Puskesmas

- e. Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Khusus

Pelayanan kesehatan pada hari khusus dan event tertentu, pelayanan posko lebaran pembinaan kesehatan Jemaah haji, peningkatan IKS dan pelaksanaan kesehatan daerah terpencil sunatan massal dan bibir sumbing

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pelayanan kesehatan pada hari khusus dan event tertentu, pelayanan posko lebaran dan Nataru sebanyak 2 posko, terlaksananya pembinaan kesehatan Jemaah haji sebanyak 168 orang, dan pertemuan Bimtek analisis hasil validasi PIS-PK dan Monev terintegrasi lintas program di Puskesmas sebanyak 75 Orang serta meningkatnya cakupan IKS di Kabupaten Dharmasraya menjadi 0.18

- f. Sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Output sub kegiatan ini adalah jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

- g. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan/dan pendampingan akreditasi puskesmas

h. Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT RSUD Sungai Rumbai

Output Sub Kegiatan ini adalah Meningkatnya mutu layanan terhadap pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi serta tersedianya obat, perbekalan kesehatan, alat kesehatan maupun sarana dan prasarana rumah sakit. Penerima manfaat dari pemenuhan operasional pelayanan rumah sakit adalah pasien atau masyarakat Dharmasraya dan sekitarnya. Dan Meningkatnya mutu layanan kesehatan rumah sakit dilihat dari efisiensi pelayanan dengan indikator BOR, LOS, TOI dan BTO. BOR merupakan persentase/rata-rata tempat tidur terisi mencapai 8,2%. Hal ini belum mencapai target yang diharapkan sebesar 35%. Indikator BOR sesuai standar DEPKES berkisar antara 60-85%, sehingga capaian RSUD Sungai Rumbai tahun 2022 belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena masa pandemi berdampak pada kunjungan pasien RSUD Sungai Rumbai di tahun 2022.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Output sub kegiatan ini adalah terkelolanya sistem informasi kesehatan untuk menunjang kegiatan pekerjaan di lingkungan Dinas Kesehatan

B. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1. Pemberian izin praktek tenaga kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan agar pelaksanaan pekerjaan di Dinas Kesehatan terukur dengan baik.

2. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya perencanaan, distribusi SDM namun pemerataan sumber daya manusia Belum Terpenuhi

b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Output sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan agar pelaksanaan pekerjaan di Dinas Kesehatan tertunjang dengan baik.

C. PROGRAM KESEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1. Kegiatan Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Tradisional (UMOT)

a. Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan, Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Tradisional (UMOT)

Output sub kegiatan ini adalah Pengawasan terhadap 39 Sarana Apotek, 15 Toko Obat 1 PKRT dan 1 UMOT dan pertemuan Bimtek Pelayanan Kefarmasian untuk Tenaga Tekhnis Kefarmasian di Puskesmas sebanyak 45 Orang.

III. Sasaran meningkatnya akuntabilitas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan koordinasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan disampaikan dalam bentuk Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah yang terkait dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan disampaikan dalam bentuk dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output Sub Kegiatan ini adalah dibayarkan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Kesehatan selama 1 tahun anggaran berjalan, disampaikan dalam bentuk dokumen pelaporan pembayaran gaji dan tunjangan ASN

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor untuk menunjang kegiatan di dinas kesehatan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kegiatan pekerjaan di Dinas Kesehatan

c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga untuk mendukung kegiatan pekerjaan di Dinas Kesehatan

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya bahan logistik kantor untuk mendukung proses pekerjaan di Dinas Kesehatan

e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan proses penggandaan dalam mendukung proses pekerjaan di Dinas Kesehatan

f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output Sub Kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD untuk mendukung proses pekerjaan di Dinas Kesehatan

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi (internet), sumber daya air dan listrik untuk menunjang kegiatan pekerjaan di Dinas Kesehatan

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan pekerjaan di dinas Kesehatan

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output Sub Kegiatan ini adalah tersedianya jasa pelayanan umum kantor untuk menunjang pekerjaan di Dinas Kesehatan

5. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan**
Output sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, serta biaya untuk pemeliharaan dan biaya pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di Dinas Kesehatan
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
Output sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya untuk pemeliharaan dan biaya pajak serta perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan di Dinas Kesehatan
6. **Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT Puskesmas**
- a. **Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPT Puskesmas**
Ouput Sub Kegiatan adalah terlaksannya penunjang pelayanan BLUD di 14 UPT Puskesmas

KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No	Kebijakan Startegis	Dasar Hukum	Tujuan Masalah Diselesaikan
1.	Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022	Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor :188.45/56/KPTS-BUP-2022	Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat dan penyalahgunaan Obat dan bahan berbahaya dalam obat dan makanan Koordinasi Pengawasan obat dan makanan dikabupaten Dharmasraya
2	Tentang Pembentukan Tim Manajemen dan Penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respon Kabupaten Dharmasraya	SK BUPATI No: 188.45/231/KPTS-BUP/2022	Upaya dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
3	Prevalensi Stunting dengan target indikator Gizi tahun 2022 adalah 18.4 %	Keputusan Bupati Dharmasraya No. 188.45/65/KPTS-Bup/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Dharmasraya	Meningkatkan pemberian makanan tambahan lokal untuk balita stunting dan menggalakkan Aksi bergizi di Sekolah dengan pemberian TTD kepada Remaja putrid an konsumsi makanan gizi seimbang
4.	Pembentukan Tim Verifikasi Open Defecation Free atau Stop Buang Aor Besar Sembarangan	Keputusan Bupati Dharmasraya No.188.45/KPTS-BUP/2022	Mewujudkan Kabupaten Dharmasraya Stop Buang Air BesarSembarangan atauga Open Defication Free (ODF)

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN 2021

No	Kebijakan Startegis 2021	Dasar Hukum	Tujuan Masalah Diselesaikan
1	Kebijakan kepala daerah berkaitan dalam penanganan masyarakat yang terdampak covid-19 dengan melakukan refocusing anggaran sesuai dengan <i>Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2021</i> . Dengan menyusun kembali skala prioritas kegiatan atas anggaran yang telah dianggarkan pada awal tahun 2021		Anggaran yang diperuntukkan untuk Dinas Kesehatan diarahkan untuk pencegahan dan pengendalian covid-19 di masyarakat, melalui sosialisasi, promosi, edukasi kepada masyarakat tentang Pandemi Covid-19 disertai dengan himbauan untuk melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru. Dengan demikian diharapkan masyarakat paham dan mengerti dengan kondisi Pandemi Covid-19, berperilaku hidup bersih dan sehat serta mematuhi semua himbauan yang disampaikan terutama dalam penerapan 6 M (Menggunakan Masker, Mencuci Tangan dengan air dan sabun, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan, Membatasi Mobilitas dan Melakukan Vaksinasi)
2	Memanfaatkan anggaran yang sudah ada dengan cara merubah kegiatan yang sudah ada dalam DPA sebelumnya menjadi kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19, mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).		Penggunaan anggaran untuk pencegahan dan penangan Covid-19 pengunaannya di upayakan secara efektif dan Efisiens.

3	Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Pandemi Covid-19 dan manfaat dari vaksinasi covid-19 dalam rangka membentuk kekebalan kelompok di masyarakat dengan cara memberikan vaksinasi minimal 70% di masyarakat		Memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang vaksin covid-19
---	--	--	--

Pulau Pinang, Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Kesehatan



Drs. Yefrinaldi, MM
NIP. 19670608 199403 1 008